

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENOLAKAN MAGANG CALON NOTARIS MAGANG DI KABUPATEN BANYUMAS

Ali Dwi Iskandar

Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: ali.iskandar.notariat@gmail.com

Abstract

This study is to analyze the role of the Regional Supervisory Assembly against the rejection of apprenticeships of prospective interns in the Banyumas Regency. Researchers use a sociological juridical approach. Based on the research that has been done, the Role of the Regional Supervisory Assembly against the rejection of apprenticeships of prospective notaries in terms of legal protection, the Banyumas District Supervisory Assembly provides advice for prospective notary apprentices should not have applied for internships on their own initiative but instead used a letter of recommendation given by notary organizations and for the implementation of Article 16 paragraph (1) letter n law - The Notary Department Law has not been implemented with good because of several factors namely substance factors (legislation), structural factors (law enforcement), cultural factors (habits).

Keywords: *Role, Regional Supervisory Assembly, Legal Protection*

Abstraksi

Penelitian ini untuk Menganalisis Peran Majelis Pengawas Dearah terhadap penolakan magang calon notaris magang di Kabupaten Banyumas. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap penolakan magang calon notaris magang dalam hal perlindungan hukum, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas memberikan saran untuk calon notaris magang sebaiknya sudah tidak melakukan permohonan magang atas prakarsa sendiri melainkan menggunakan surat rekomendasi yang diberikan oleh organisasi notaris dan untuk implementasi Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang – Undang Jabatan Notaris belum terimplementasi dengan baik karena beberapa faktor yaitu faktor substansi (peraturan perundang – undangan), faktor struktur (penegak hukum), faktor budaya (kebiasaan).

Kata kunci: Peran, Majelis Pengawas Daerah, Perlindungan Hukum.